

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Sejarah Kota Probolinggo

Pada zaman Pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama “Banger”, nama sungai yang mengalir di tengah daerah Banger ini. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku Negarakertagama yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Prapanca. Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan/kekuasaan di zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami perubahan-perubahan/perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara

antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”.

Pada masa Pemerintahan VOC, setelah kompeni dapat meredakan Mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono dipengaruhi, diadu untuk menangkap/membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni. Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kyai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono menyesali tindakannya. Kyai Djojolelono mewarisi darah ayahnya dalam menentang/melawan kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhannya tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara/lelono.

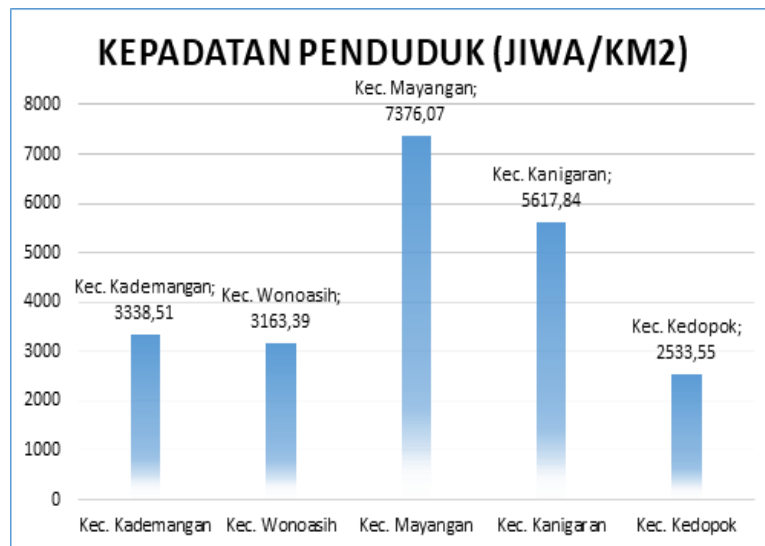
Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro, Bupati Surabaya ke 10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Kompeni tetap kompeni, bukan kompeni kalau tidak adu domba. Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean “Sentono”, yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat. Di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Beliau juga mendirikan Masjid Jami’ (± Tahun 1770). Karena sangat disenangi masyarakat, beliau mendapat sebutan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi “Probolinggo” (Probo : sinar, linggo : tugu, badan, tanda peringatan, tongkat). Probolinggo : sinar yang berbentuk tugu, gada, tongkat (mungkin yang dimaksud adalah meteor/bintang jatuh). Setelah wafat Kanjeng Djimat dimakamkan di pasarean belakang Masjid Jami’(portal.probolonggokota.go.id).

b. Demografi

Jumlah penduduk Kota Probolinggo akhir tahun 2017 hasil registrasi penduduk, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebesar 235.440 jiwa. Bila dilihat dari status kewarganegaraan, hanya 0,03 persen atau sebesar 73 jiwa yang berkewarganegaraan asing (WNA) dari total penduduk Kota Probolinggo.

Kepadatan Penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi. Pada tahun 2017, kepadatan penduduk Kota Probolinggo sebesar 4.155,31 orang per km persegi. Kecamatan Mayangan merupakan kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar dibandingkan 4 kecamatan yang lain yaitu sebesar 7.376,07 orang per km persegi. Sebaliknya, Kecamatan Kedopok merupakan kecamatan yang dengan kepadatan penduduk terendah yaitu hanya 2.533,55 orang per km persegi.

Diagram 4.1
Kepadatan Penduduk Kota Probolinggo



Sumber : Kota Probolinggo, 2023

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk WNI perempuan tahun 2017 lebih banyak daripada penduduk laki-laki yaitu sebanyak 118.553 jiwa (50,35%). Sedangkan untuk jumlah penduduk WNA, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 45 orang (61,64%) dan penduduk perempuan sebanyak 28 orang (38,36%).

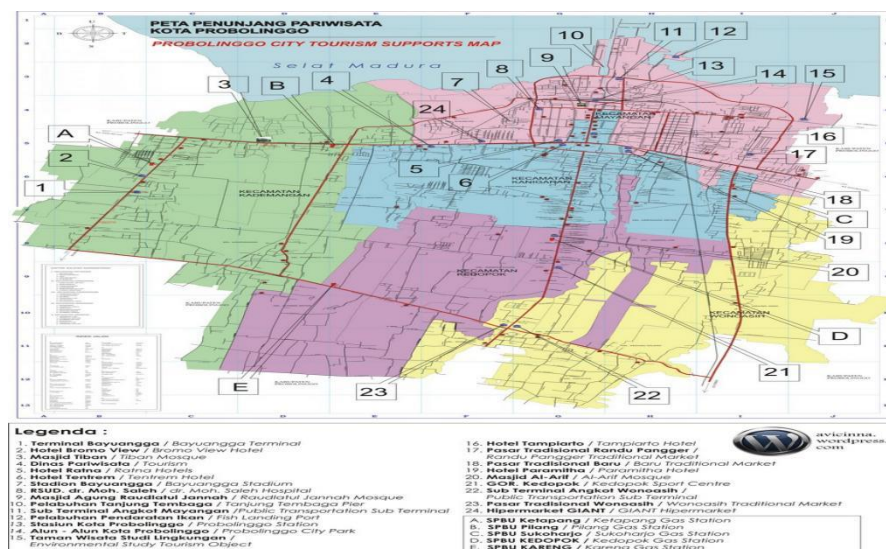
Berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk paling banyak berada pada rentang usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 20.057 jiwa (8,52%) dan yang paling sedikit adalah yang berada pada rentang usia 70-74 tahun yaitu sebanyak 3.920 jiwa (1,66%) (portal.probolingkokota.go.id).

c. Geografis

Kota Probolinggo secara geografis terletak pada koordinat 7 43'41"- 7 49'04" Lintang Selatan dan 113 10' - 113 15' Bujur Timur, dengan garis pantai sepanjang 7 km² dan secara umum terletak di propinsi Jawa Timur bagian Timur berbatasan dengan kota Pasuruan dan Kabupaten Lumajang.

Kota transit yang dilewati oleh jalur jalan propinsi yang sangat sibuk. Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 - 50m di atas permukaan air laut, dengan tanah dengan karakteristik berlereng dari luas kota secara keseluruhan.

Gambar 4.1
Geografis Kota Probolinggo



Sumber : Kota Probolinggo, 2023

d. Infrastruktur

Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Jalan merupakan salah satu fasilitas/sarana utama dalam mendukung kelancaran setiap kegiatan masyarakat. Menurut pemerintah yang berwenang jalan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kota. Panjang jalan di Kota Probolinggo mencapai 222,15 km jalan beraspal yang terdiri dari 22,04 km (9,92%) jalan negara dan 199,11 km (89,63%) jalan kota. Bila dilihat berdasarkan kondisinya, seluruh jalan negara dalam kondisi baik. Sedangkan untuk kondisi jalan kota, sepanjang 161,82 km (81,27%) dalam kondisi baik sampai sedang dan 37,29 km (18,73%) dalam kondisi rusak sampai rusak berat. Bila dilihat berdasarkan kelasnya, jalan negara di Kota Probolinggo merupakan jalan kelas I dan jalan kota merupakan jalan kelas III (portal.probolinggokota.go.id).

e. Visi

Membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahterah, transparan, aman dan berkelanjutan.

f. Misi

- 1) Pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, didukung percepatan sektor perdagangan, industri, jasa, serta sektor potensial lainnya.
- 2) Sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- 3) Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana.
- 4) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik.

2. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo**a. Profil Dinas Perhubungan Kota Probolinggo**

Dinas Perhubungan sebelumnya adalah Dinas LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota, dibentuk pada tahun 1997 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun

1994, mengalami perubahan kelembagaan menyongsong diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang pelaksanaannya dimulai penuh tanggal 1 Pebruari 2000, untuk itu Pemerintah Kota Probolinggo menyusun kelembagaan baru Dinas LLAJ Kota Probolinggo berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas LLAJ. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Probolinggo menindaklanjuti dengan melakukan penataan kelembagaan sebagai upaya untuk penyesuaian kemampuan dan kebutuhan kelembagaan dengan kondisi di Wilayah Pemerintah Kota Probolinggo dan pada akhirnya diterbitkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo menyusul Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan. Serta Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Kemudian setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan mengalami perubahan nomenklaturnya dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2008 yang dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menjadi 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Bidang, 2 (dua) UPT dan masing-masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT (dishub.probolinggokota.go.id).

b. Tugas Pokok

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo berpedoman pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Perhubungan adalah **“Membantu Walikota Melaksanakan**

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan di Bidang Perhubungan” (dishub.probolinggota.go.id).

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang perhubungan;
- 5) Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya (dishub.probolinggota.go.id).

d. Visi

“Terwujudnya keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Probolinggo”.

e. Misi

“Meningkatkan keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi melalui penyediaan data dan infrastruktur transportasi yang memadai”.

f. Struktur Organisasi

Struktur Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1) Bagian Sekretariat

- a) Sub bagian tata usaha;
- b) Sub bagian program;
- c) Sub bagian keuangan.

2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

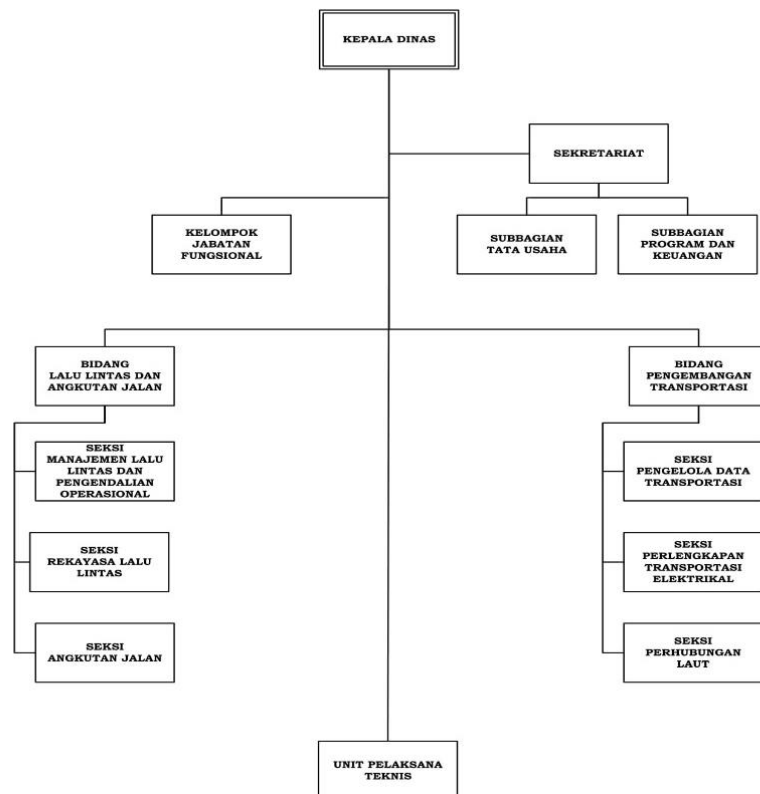
- a) Seksi manajemen lalu lintas dan pengendalian operasional;
- b) Seksi rekayasa lalu lintas;
- c) Seksi angkutan jalan.

3) Bidang Pengembangan Transportasi

- a) Seksi pengelola data transportasi;
- b) Seksi perlengkapan transportasi elektrikl;
- c) Seksi perhubungan laut (dishub.probolinggokota.go.id)

g. Bagan Organisasi

Bagan 4.1
Organisasi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Upaya Dinas Perhubungan Dalam Menangani Parkir Liar Di Kota Probolinggo

Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada untuk mencapai suatu tujuan dan dapat memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat tingkat suatu keberhasilan dalam melaksanakan upaya penataan parkir yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Adapun 4 (empat) indikator upaya Dinas Perhubungan Dalam Menata Parkir Jalan Umum Kota Probolinggo dapat disajikan dalam penyajian data sebagai berikut:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Sukarna, 2011:10). Berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mengatakan bahwa:

“Parkir adalah bagian dari fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah, parkir ini kan fasilitas umum, maka sudah seharusnya digunakan dengan sebaiknya oleh masyarakat. Untuk penentuan dimana lokasi parkir nya itu sudah ditentukan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu dilihat dari beberapa aspek. Hal ini berguna agar keberadaan parkir tidak berbenturan dengan kepentingan umum. Sebelum melakukan dimana lokasi penetapan parkirnya, kami melakukan pengkajian terlebih dahulu agar manfaatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 10 juli 2023, jam 10:00 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Pentingnya suatu perencanaan yakni untuk merancang suatu tujuan yang diinginkan serta tujuan tersebut tepat pada sasaran. Perencanaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam perparkiran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Partono Bastian S.T, M.M, jawaban dari narasumber yang lain yakni Bapak Purwantoro Noviyanto S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan penetapan lokasi parkir haruslah melakukan pengkajian terlebih dahulu.

Karena ketika lokasi parkir sudah ditetapkan dengan sembarangan, maka nantinya akan menimbulkan permasalahan yang timbul di masyarakat, sehingga sebelum melakukan semua itu perlu dikaji terlebih dahulu”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Purwantoro Noviyanto S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 10 juli 2023, jam 10:30 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Penetapan pada perencanaan harus berdasarkan suatu pengkajian terlebih dahulu, supaya perencanaan tersebut bisa berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan suatu permasalahan di kalangan masyarakat.

Kemudian pendapat lain dikatakan oleh Moch Fanani selaku juru parkir di Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Menurut saya penataan parkir di Kota Probolinggo sudah lumayan baik, karena sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, karena lokasi parkir saat ini sudah tidak sembarangan lagi, sehingga tidak menyebabkan kemacetan lagi”. (Hasil wawancara dengan Moch. Fanani selaku juru parkir pada tanggal 10 juli 2023, jam 10:15 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo).

Perencanaan penataan parkir yang ada di Kota Probolinggo sudah lumayan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam penataan parkir.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan (Sukarna, 2011:46). Maka hasil dari penelitian bahwa upaya Dinas Perhubungan Dalam Menata Parkir Jalan Umum Kota Probolinggo bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah penataan, berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mengatakan bahwa:

“Dalam proses pelaksanaannya ini kami sudah melakukan koordinasi dengan satlantas Kota Probolinggo, pengelola pasar, dan pihak lain yang berkepentingan dengan fasilitas parkir di tepi jalan umum Kota Probolinggo (semisal pasar), dalam proses pelaksanaannya atau pengorganisasian ini, lintas sektor tersebut sudah cukup mendukung, sehingga akan memudahkan kami untuk membuat

regulasi yang lebih baik lagi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 10 juli 2023, jam 10:00 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Dalam suatu pengorganisasian untuk mencapai suatu tujuan, kami tidak bisa melakukannya sendiri tanpa adanya bantuan dari suatu instansi lainnya yang membantu dalam proses penataan parkir. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam melaksanakan program penataan perparkiran dibantu oleh beberapa instansi lainnya, sesuai dengan hasil wawancara diatas.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah membangkitkan atau mendorong semua anggota kelompok supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pimpinan. Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan

yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tool of management* (Sukarna, 2011:82-83).

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M mengatakan bahwa:

“Sebagai Kepala Rekayasa Lalu Lintas, kami sudah diberikan wewenang untuk mengecek apakah lokasi parkir yang sudah ditetapkan memiliki hambatan atau tidak. Kami berwenang untuk terus melakukan *controlling* secara kontinu agar regulasi yang sudah dikeluarkan tepat sasaran dan juga sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo”. (Hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 10 juli 2023, jam 10:00 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Pelaksanaan penataan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan tersebut dilakukan dengan cara membagi tugas-tugas kepada pegawai dengan kesesuaian tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Partono Bastian S.T, M.M, jawaban dari narasumber yang lain yakni Bapak Purwantoro Noviyanto

S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan mengatakan bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan terkait regulasi penataan parkir, kami sudah melakukan koordinasi dengan bawahan kami. Dalam pelaksanaannya mulai dari mekanisme, survei lokasi, identifikasi pengkajian perencanaan desain penentuan penetapan lokasi dan evaluasi. Untuk menjalankan pelaksanaan diatas kami sudah memberikan tugas dan wewenang kepada masing-masing jabatan untuk sesuai dengan tugas dan fungsinya”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Purwanto Noviyanto S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 10 juli 2023, jam 10:30 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Kemudian pendapat lain dikatakan oleh Moch Fanani selaku juru parkir di Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Menurut saya penempatan lokasi parkir sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Lokasi-lokasi parkir cukup strategis meskipun sedikit menimbulkan sedikit kemacetan. Selain kemacetan banyaknya juru parkir yang melakukan pemungutan liar. Kami sebagai juru parkir yang berusaha menaati aturan serta tidak dipungut retribusi parkir, kami berusaha agar kendaraan tidak menimbulkan kemacetan meskipun, tidak diberikan uang parkir”. (Hasil wawancara dengan Moch. Fanani selaku juru parkir

pada tanggal 10 juli 2023, jam 10:15 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo).

Kemudian pendapat lain dikatakan oleh Titik Winarsih selaku warga Probolinggo mengatakan bahwa:

“Menurut saya juru parkir banyak yang tidak jujur karena biasanya retribusi parkir sering tidak dikembalikan sehingga membuat kami enggan untuk memarkir kendaraan di lokasi yang sudah ditentukan. Jika lokasi parkir banyak menimbulkan kemacetan itu disebabkan karena banyak warga yang merasakan hal seperti saya, sehingga mereka lebih memilih menunggu di kendaraan daripada memarkir kendaraan”. (Hasil wawancara dengan Titik Winarsih selaku warga Probolinggo pada tanggal 10 juli 2023, jam 11:00 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo).

Kemudian pendapat lain dikatakan oleh Deny Arizal selaku warga Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Menurut saya perlu diberikannya identitas resmi, mana juru parkir yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan ataupun juru parkir liar. Hal ini agar kami sebagai masyarakat tidak dirugikan dengan adanya retribusi. Karena sekarang banyak lokasi parkir yang mengatakan tidak boleh memberikan uang parkir. Namun ada saja juru parkir liar yang memanfaatkan keadaan tersebut”. (Hasil wawancara dengan Deny Arizal selaku warga Kota Probolinggo pada tanggal 10 juli 2023, jam 12:15 WIB di Jalan Gatot Subroto Kota Probolinggo).

Sedangkan pendapat lain dikatakan oleh Ida selaku warga Probolinggo mengatakan bahwa:

“Penataan parkir di Jalan Dr. Soetomo ini sudah lumayan baik, pusat perbelanjaannya pun sudah menyediakan tempat parkir yang cukup memadai, namun ada juga yang tidak menyediakan tempat parkir. Di jalan ini masih sering terjadi kemacetan, apalagi di hari libur dan seperti sekarang ini bulan Ramadhan. Kemacetan ini terjadi karena banyaknya konsumen yang memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan”. (Hasil wawancara dengan Ida selaku warga Probolinggo pada tanggal 13 Juli 2023, jam 10:00 WIB di Jalan Dr. Soetomo Kota Probolinggo).

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu ukuran, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dengan rencana yaitu selaras dengan ukuran (Sukarna, 2011:116).

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mengatakan bahwa:

“Setelah regulasi dikeluarkan kami selalu Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas memastikan agar sesuai dengan perencanaan awal. Kami selalu melakukan pengawasan secara kontinu dengan cara penempatan petugas pegawai juru parkir dari Dinas Perhubungan, kami juga melakukan mekanisme pelaporan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kami juga melakukan proses pelaporan dan pelaksanaan tugas penataan parkir melalui proses administrasi. Dengan rutin diadakan pengawasan ini kami berharap agar masalah yang terjadi di lapangan dapat kami ketahui sehingga kami dapat melakukan perbaikan untuk menyempurnakan regulasi tadi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:00 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan baik, pegawai-pegawai Dinas Perhubungan pada saat ini sering melakukan pengawasan di sejumlah titik Jalan Umum Kota Probolinggo.

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Moch. Fanani, selaku juru parkir Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Orang-orang dari Dinas Perhubungan Kota Probolinggo beberapa kali sering datang ke lokasi parkir, hal itu cukup bagus menurut kami, karena jika ada juru parkir yang nakal maka dapat segera ditindak. Rutinnya diadakan pengawasan atau terjun ke lapangan ini membuat juru parkir yang tidak jujur

akan menjadi sadar.” (Hasil wawancara dengan Moch. Fanani selaku juru parkir pada tanggal 16 juli 2023, jam 10:15 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo).

2. Faktor pendukung dan penghambat dari Upaya Dinas Perhubungan Dalam Menangani Parkir Liar Di Kota Probolinggo

a. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan upaya penataan parkir yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, maka akan berhasil ketika terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun faktor pendukung sebagai berikut:

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Menurut Bapak Purwantoro Noviyanto selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa:

“Keberhasilan suatu penataan perparkiran didukung dengan adanya komitmen yang dilakukan oleh para pelaku perparkiran mulai dari juru parkir, pengawas parkir dan petugas administrasi serta kesadaran masyarakat terhadap keteraturan dan ketertiban

parkir di tepi jalan umum. Serta adanya program parkir berlangganan masyarakat tidak dipungut retribusi parkir berkali-kali pada lokasi yang sama, walaupun masih ditemukan adanya laporan pungutan parkir oleh juru parkir yang bertugas”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Purwantoro Noviyanto S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:30 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya.

Menurut Bapak Purwantoro Noviyanto selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa:

“Kami selaku pihak Dinas Perhubungan tidak bisa menjalankan program penataan parkir sendirian, maka dari itu kami bersama dengan Satlantas, pengelola pasar dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Kami saling berkoordinasi satu sama lain untuk suksesnya program penataan parkir”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Purwantoro Noviyanto S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:30 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Berikut berdasarkan hasil wawancara dengan Moch. Fanani, selaku juru parkir Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan terhadap kami sudah berjalan dengan baik. Kami sering sekali dikumpulkan, kemudian diberikan pengarahan tentang masalah perparkiran. Kami selalu diberi arahan bawasannya tugas kami selaku juru parkir, melayani masyarakat yang enggan parkir serta bersikap ramah terhadap pelanggan parkir”. (Hasil wawancara dengan Moch. Fanani selaku juru parkir pada tanggal 16 juli 2023, jam 10:15 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo).

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Menurut Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung keberhasilan dari penataan parkir sudah kami sediakan berupa perlengkapan jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan untuk parkir. Program parkir berlangganan bagi masyarakat yang berdomisili Probolinggo raya,

yakni Kabupaten dan Kota Probolinggo, serta penempatan juru parkir di Jalan Umum Kota Probolinggo”. (Hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:00 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Sedangkan hasil wawancara dengan Moch. Fanani, selaku juru parkir Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Penataan parkir di Kota Probolinggo sudah terlaksana dengan baik. Pihak Dinas Perhubungan di areal parkir pasar baru ini sudah memberikan fasilitas parkir bawasannya disisi selatan jalan dipergunakan untuk parkir mobil, sedangkan jalan sisi utara dipergunakan untuk parkir motor. Dengan adanya kebijakan demikian dapat mempermudah tugas kami dalam melaksanakan penataan parkir”. (Hasil wawancara dengan Moch. Fanani selaku juru parkir pada tanggal 16 juli 2023, jam 10:15 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo).

Sedangkan hasil wawancara dengan Titik Winarsih selaku warga Probolinggo mengatakan bahwa:

“Dengan adanya penataan parkir saya rasa sudah bagus, soalnya kalau parkir ini ditata dengan baik maka tidak akan timbul kemacetan. Biasanya banyak orang yang parkir sembarangan dan tidak ditata. Dengan adanya penataan ini adalah solusi yang bagus, jalan terlihat lebih luas dan tidak menimbulkan kemacetan”. (Hasil wawancara dengan Titik Winarsih selaku warga Probolinggo pada tanggal 16 juli 2023, jam 11:00 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo).

Sedangkan hasil wawancara dengan Deny Arizal selaku warga Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Penataan parkir di Kota Probolinggo sudah lumayan baik untuk mengurangi kemacetan. Sudah minim sekali dijumpai parkir-parkir dengan pungutan liar di daerah Kota Probolinggo dan untuk destinasi wisata juga tarif parkirnya normal. Jadi menurut saya, Dinas Perhubungan sudah lumayan baik memberi kontribusi. Penataan parkir merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan di Kota Probolinggo, supaya motor-motor yang berserakan di bahu jalan bisa tertata dengan rapi agar tidak menyebabkan tabrakan dengan arus pengguna lainnya”. (Hasil wawancara dengan Deny Arizal selaku warga Kota Probolinggo pada tanggal 16 juli 2023, jam 12:15 WIB di Jalan Gatot Subroto Kota Probolinggo).

Sedangkan hasil wawancara dengan Ida selaku warga Probolinggo mengatakan bahwa:

“Adanya penataan di Jalan Dr. Soetomo ini sudah lumayan baik, beberapa pertokoan di jalan ini ada yang menyediakan tempat parkir. Tetapi di jalan ini masih sering terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh konsumen yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, terutama kendaraan roda empat”. (Hasil wawancara dengan Ida selaku warga Probolinggo pada tanggal 15 juli 2023, jam 10:00 WIB di Jalan Dr. Soetomo Probolinggo).

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Bapak Purwantoro Noviyanto selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa:

“Pengawasan dalam hal penataan parkir yang kami lakukan dengan cara menyebarkan pembagian petugas pengawas parkir untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas parkir. Apabila ada kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan yang sudah di sediakan oleh kami ataupun tidak tertata rapi, maka kami akan segera menindak lanjuti kejadian tersebut dengan cara menggembosi ban dari kendaraan tersebut”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Purwantoro Noviyanto S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:30 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

b. Faktor Penghambat

Upaya tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana ada saja faktor yang dapat menghambat. Khususnya pada program penataan parkir itu sendiri. Adapun faktor yang menjadi penghambat sebagai berikut:

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan.

Menurut Bapak Purwantoro Noviyanto selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa:

“Ketidak patuhan warga dalam menggunakan fasilitas yang sudah kami sediakan, mereka seringkali memarkirkan kendaraan mereka tidak pada tempatnya. Adanya juru parkir yang tidak mematuhi aturan parkir gratis bagi masyarakat yang sudah berlangganan, sehingga kebanyakan dari masyarakat yang mengeluh akan hal itu”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Purwantoro Noviyanto S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:30 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M, selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mengatakan bahwa:

“Penghambat dari penataan parkir ini tak lain diakibatkan oleh banyaknya pertokoan atau bangunan yang tidak menyediakan tempat parkir pelanggannya. Banyaknya bangunan komersial tersebut menjadi penghambat penataan dan menyebabkan banyaknya kemacetan di jalan-jalan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:00 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokkan, pengaturan dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya.

Menurut Bapak Partono Bastian S.T, M.M, selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas penataan parkir ini dan demi tercapainya suatu perencanaan untuk mencapai tujuan, kami tidak dapat melaksanakannya dengan tim dari Dinas Perhubungan saja, kami masih membutuhkan kerjasama dari instansi/organisasi lainnya seperti satlantas, pengelola pasar dan pihak lain yang berkepentingan dengan fasilitas parkir di tepi jalan umum (missal pasar)”. (Hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:00 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah perbuatan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai tujuan dengan ikhlas

serta serasa dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Menurut Bapak Purwantoro Noviyanto selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa:

“Juru parkir adalah personil yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan ditempatkan untuk bertugas melayani penyediaan parkir dengan atribut dan tanda pengenal resmi. Namun banyak keluhan yang kami dengar bawasannya masih ada juru parkir yang tidak melayani pengguna parkir dengan baik. Misalnya seperti ada pengguna parkir yang meminta bantuan untuk mengeluarkan kendaraan mereka karena kesulitan akan kendaran-kendaraan di dekatnya, juru parkir tersebut masih ada yang tidak melayaninya dengan baik”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Purwantoro Noviyanto S.STP, M.Si selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:30 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

Sedangkan hasil wawancara dengan Titik Winarsih selaku warga Probolinggo mengatakan bahwa:

“Banyaknya yang parkir di depan pintu pasar, sehingga itu menimbulkan jalan semakin sempit dan menimbulkan kemacetan apalagi mobil-mobil yang parkir dapat menambah sempit bahu jalan. Kalau tidak ditata dengan rapi akan terjadi semrawutan dan kemacetan, apalagi ini termasuk jalan utama”. (Hasil wawancara dengan Titik Winarsih selaku warga

Probolinggo pada tanggal 16 juli 2023, jam 11:00 WIB di Pasar Baru Kota Probolinggo).

Sedangkan hasil wawancara dengan Deny Arizal selaku warga Kota Probolinggo mengatakan bahwa:

“Masih banyaknya orang-orang pengguna parkir yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat, meskipun sudah ada tanda larangan parkir mereka tetap saja memarkirkan kendaraannya di depan pertokoan yang ingin mereka kunjungi. Di Jalan Gatot Subroto ini banyak parkir yang semrawut, dan itupun disebabkan oleh pertokoan yang tidak menyediakan tempat parkir di depan tokonya sehingga para pelanggan mereka memarkirkan kendaraannya di jalan umum dan mengakibatkan kemacetan berkepanjangan”. (Hasil wawancara dengan Deny Arizal selaku warga Kota Probolinggo pada tanggal 16 juli 2023, jam 12:15 WIB di Jalan Gatot Subroto Kota Probolinggo).

Sedangkan hasil wawancara dengan Ida selaku warga Probolinggo mengatakan bahwa:

“Menurut pendapat saya, penataan parkir di Jalan Dr. Soetomo ini sering terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh beberapa pertokoan yang tidak menyediakan tempat parkir khusus untuk pelanggan mereka. Oleh karena itu banyak orang-orang yang memarkirkan kendaraan mereka di jalan umum. Hampir setiap hari jalan ini macet”. (Hasil wawancara dengan Ida selaku warga Probolinggo

pada tanggal 15 juli 2023, jam 10:00 WIB di Jalan Dr. Soetomo Kota Probolinggo).

4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah suatu tindakan atau proses kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kegagalan dan kesalahan untuk selanjutnya dilakukan suatu perbaikan dan pencegahan supaya tidak terulangnya kesalahan yang sama, serta menjaga supaya pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Menurut Bapak Partono Bastian S.T, M.M, selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mengatakan bahwa:

“Setiap harinya kami sudah menyebarkan pegawai dari Dinas Perhubungan untuk mengawasi dan memberikan laporan terhadap pelaksanaan tugas perparkiran, namun masih saja banyak terjadinya parkir tidak di tempat yang sudah kami sediakan. Hal tersebut masih sering terjadi di jalan umum Kota Probolinggo ini, kami sudah seringkali menegur masyarakat yang parkir tidak pada tempatnya dan langsung menggembosi kendaraannya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Partono Bastian S.T, M.M selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada tanggal 14 juli 2023, jam 10:00 WIB di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo).

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Upaya Dinas Perhubungan Dalam Menangani Parkir Liar Di Kota Probolinggo

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa dari segi upaya dinas perhubungan dalam menata parkir jalan umum kota probolinggo, dinas perhubungan telah melakukan berbagai upaya seperti bekerja sama dengan berbagai instansi meliputi pihak satlantas, pengelola pasar, dan pihak lain yang berkepentingan dengan fasilitas parkir di tepi jalan umum kota probolinggo agar instansi terkait dapat terlibat langsung dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan parkir di kota probolinggo. Dinas perhubungan juga menyediakan perlengkapan sarana dan prasarana jalan berupa rambu-rambu lalu lintas dan marka parkir agar masyarakat probolinggo raya dapat memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti parkir sembarangan di bahu jalan, akan tetapi masyarakat masih melanggar tata tertib parkir yang berlaku dan tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalan. Dinas perhubungan juga selalu melakukan pengawasan terhadap juru parkir, pengawas parkir, dan para petugas administrasi agar dalam proses pengawasan tersebut tidak terjadi miskomunikasi dalam pengelolaan penataan parkir.

a. *Planning* (Perencanaan)

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dari segi perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam upaya penataan parkir di Kota Probolinggo sudah baik. Dinas Perhubungan telah merencanakan lahan parkir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sebelum melakukan penetapan lokasi parkir ada beberapa tahapan dalam melakukan penetapan lahan parkir tersebut salah satunya yaitu dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu sudah sesuai dengan aspek atau belum agar keberadaan parkir tidak berbenturan dengan kepentingan umum serta memiliki manfaat sesuai dengan masyarakat Kota Probolinggo. Pentingnya pengkajian tersebut dilakukan ketika nanti sudah ditetapkan sebagai lahan parkir agar tidak timbul masalah baru, karena ketika lokasi lahan parkir sudah ditetapkan secara sembarangan tanpa melakukan pengkajian terlebih dahulu maka akan timbul masalah baru serta adanya pro dan kontra terhadap lahan yang telah ditetapkan. Maka dari itu pentingnya pengkajian tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan dari adanya penataan lahan parkir yang ada di Kota Probolinggo.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya dalam hal penataan parkir di Kota Probolinggo bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti satlantas dan beberapa stakeholder seperti juru parkir, pengawas parkir dan masyarakat Kota Probolinggo. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo melakukan kerjasama dengan satlantas dalam bertugas mengurai kemacetan yang terjadi akibat adanya parkir di bahu jalan. Selain itu tugas dari satlantas yaitu bertugas mengatur arus lalu lintas yang ada di jalan Kota Probolinggo. Dinas Perhubungan juga melakukan tugasnya dengan memberikan lahan parkir dan penataan parkir yang ada di Kota Probolinggo, selain itu Dinas Perhubungan juga bekerjasama dengan juru parkir dan pengawas parkir dalam menata parkir di Kota Probolinggo agar masyarakat dapat parkir secara teratur dan menaati peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan. Adanya kerjasama tersebut dapat menuntaskan masalah kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Probolinggo dan salah satu upaya Dinas Perhubungan yaitu dengan melakukan penataan parkir di setiap jalan di Kota Probolinggo.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yaitu melakukan wewenang untuk mengecek apakah lokasi parkir yang sudah ditetapkan memiliki hambatan atau tidak serta Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terus melakukan *controlling* terhadap semua jajaran yang ada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo apakah sudah sesuai sasaran atau tidak. Dinas perhubungan Kota Probolinggo juga telah melakukan koordinasi terhadap bawahan seperti juru parkir, pengawas parkir dan lain-lain agar selalu melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme, perencanaan serta survey lokasi yang sesuai untuk melakukan pelaksanaan penataan parkir yang akan dijadikan sebagai lahan parkir. Lahan parkir yang disediakan oleh dinas perhubungan sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta dapat mengatasi permasalahan kemacetan yang diakibatkan oleh parkir sembarangan dan melanggar peraturan perparkiran.

c. *Controlling* (Pengawasan)

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis mengetahui bahwa bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yaitu berbentuk laporan khusus dari setiap juru parkir yang setiap bulannya di setorkan kepada Dinas Perhubungan sebagai bentuk laporan terhadap kinerja parkir di Kota Probolinggo agar masalah yang terjadi di lapangan dapat di atasi secara tepat. Dinas Perhubungan juga menerapkan pengawasan secara langsung terhadap juru parkir yang ada di Kota Probolinggo dengan cara memberikan tugas kepada pengawas parkir yang bertugas setiap harinya untuk menjaga juru parkir agar tidak terjadi kecurangan maupun terjadi pungli terhadap masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat dari Upaya Dinas Perhubungan Dalam Menangani Parkir Liar Di Kota Probolinggo

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis mengetahui bahwa faktor pendukung dari penataan parkir di Kota Probolinggo tidak lepas dari adanya upaya dari Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam menata parkir di Kota Probolinggo. Dinas Perhubungan

berkomitmen dengan seluruh jajaran seperti juru parkir, pengawas parkir dan masyarakat Kota Probolinggo untuk selalu menjaga komitmen bersama dalam menegakkan peraturan dan tata tertib dalam berparkir agar tidak terjadi masalah baru yang akan mengakibatkan kemacetan di jalanan Kota Probolinggo. Adanya kerjasama antara beberapa instansi seperti satlantas juga ikut andil dalam kelancaran penataan parkir di Kota Probolinggo dengan adanya kerjasama antar instansi dapat mempermudah mengatasi masalah yang ada di Kota Probolinggo seperti penataan parkir tersebut. Dinas Perhubungan dalam hal ini sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap lahan parkir dan penataan parkir di Kota Probolinggo dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang ada seperti mengawasi juru parkir serta memberikan arahan terhadap masyarakat bahwa pentingnya lahan parkir dan penataan parkir bagi masyarakat Kota Probolinggo. Penerapan penataan parkir di Kota Probolinggo sudah baik hal ini terjadi akibat Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sudah mempersiapkan segala kebijakan serta telah melakukan evaluasi serta pengkajian terhadap lahan parkir yang ada di Kota Probolinggo sehingga penataan parkir di Probolinggo semakin tertib dan berjalan dengan lancar.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis mengetahui bahwa terdapat berbagai faktor penghambat dalam mengatasi permasalahan penataan parkir di Kota Probolinggo salah satunya kurangnya partisipasi masyarakat Kota Probolinggo terhadap pentingnya perilaku taat peraturan parkir di Kota Probolinggo. Masyarakat rata-rata tidak memperdulikan rambu-rambu serta aturan-aturan yang berlaku di Kota Probolinggo khususnya peraturan perparkiran. Penyebab dari tidak patuhnya masyarakat di Kota Probolinggo terhadap penataan parkir salah satunya banyaknya pertokoan atau bangunan yang tidak menyediakan lahan parkir bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas perekonomian yang salah satunya terjadi di pertokoan Kota Probolinggo. Dinas Perhubungan berupaya semaksimal mungkin dalam hal pemberian fasilitas lahan parkir bagi masyarakat Kota Probolinggo akan tetapi apabila tidak ada kerjasama antara instansi maupun masyarakat masalah penataan parkir tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Gambar 4.2

Kerangka Hasil penelitian dan Pembahasan

